

## **PUBLIKASI ILMIAH**

# **STRATEGI KEPOLISIAN RESORT KOTA PONTIANAK DALAM MENJAGA KETERTIBAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM (Studi Pemilihan Umum Presiden 2014)**

**Oleh**

**HUJRA SOUMENA,S.Ik  
NPM. A.2021131086**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Marcus Lukman,SH., M.H**

**Priyo Saptomo, SH., M.H.um**

### **ABSTRACT**

his thesis discuss strategy Pontianak City Police in maintaining order on the organization of elections (Presidential Election Study 2014). In order to secure the implementation of the Presidential Election 2014 Police Pontianak organizing internally that is organizing the parts and units Operational Police Pontianak become a united force and coordinated properly it is also necessary organizing externally that the City Government of Pontianak, KPU Pontianak, Pontianak city Supervisory Committee, Organizing Committee for the 2014 presidential election and Community Potential in an integrated and coordinated systematically according to the task, role, functions and responsibilities of each in relation to the implementation pemelihan pressiden 2014. The dominant factor affecting the implementation of the 2014 Presidential Elections Police Pontianak and public order are primed in Pontianak Police region are: geographical conditions very broad Pontianak City 107.82 km<sup>2</sup>, with a population of 550 304 inhabitants. While the number of Police personnel Pontianak just as much as 1331 personnel, is certainly not sufficient to Pontianak Police efforts in protecting, nurturing and serving the people of the city of Pontianak in the face of the organization of the election year 2014.Kondisi jobs in Pontianak are still limited or not comparable with the needs of the population to get decent work in various sectors of life, has the potential to create interference in the administration of the 2014 presidential election in the City of Pontianak.Kondisi socio-economic, socio-political and socio-cultural in Pontianak are still vulnerable to the dynamics of democratic life that deviate from the values of moral, religious, social, and applicable laws and regulations, can trigger horizontal conflict and / or crime-impact kontijensi.Strategi strategy lakukakan by Pontianak City Police in maintaining maintaining order on the implementation of the 2014 presidential election through prevention, deterrence and prevention of crime to support the implementation of the general election president in 2014 conducive manner: Improving the implementation of the policing function optimally, a partnership Police with the City of Pontianak, KPU Pontianak, Panwaslu Pontianak City and related institutions, establish partnerships Police with the Community, as well as improve the ability, character, identity and professionalism Police personnel on an ongoing basis. Doing deterrence, the condition of the "threshold interference" with the objective to reduce the social order "chance factor" and lower "faith factor" through regulation, guard, escort and patrol. Enforcing the law against "real threat" kamtibmas explicitly, consequently and consistently under the provisions of applicable law.

**Keywords: Policing Strategy, the implementation of the presidential election.**

## **ABSTRAK**

Tesis ini membahas masalah strategi Kepolisian Resort Kota Pontianak dalam menjaga ketertiban pada penyelenggaraan pemilihan umum (Studi Pemilihan Umum Presiden 2014) . Dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Presiden Tahun 2014 Polresta Pontianak melakukan pengorganisasian secara intern yaitu pengorganisasian bagian-bagian dan satuan-satuan operasional Polresta Pontianak menjadi suatu kekuatan yang utuh dan terkoordinir dengan baik perlu juga dilakukan pengorganisasian secara ekstern yaitu dengan Pemerintahan Kota Kota Pontianak, KPU Kota Pontianak, Panwaslu Kota Pontianak, Panitia Penyelenggara Pilpres 2014 dan Potensi Masyarakat secara terpadu dan terkoordinir secara sistematis sesuai tugas, peran dan fungsi serta tanggung jawabnya masing-masing dalam rangka penyelenggaraan pemilihan presiden tahun 2014. Faktor dominan yang mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Presiden Tahun 2014 Polresta Pontianak dan ketertiban masyarakat yang prima di wilayah Polresta Pontianak adalah: Kondisi geografis Kota Pontianak yang sangat luas 107,82 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk 550.304 jiwa. Sedangkan jumlah personil Polresta Pontianak hanya sebanyak 1331 personil, tentunya tidak memadai dengan upaya Polresta Pontianak dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat kota Pontianak dalam menghadapi penyelenggaraan pilpres tahun 2014. Kondisi lapangan kerja di Kota Pontianak yang masih terbatas atau belum sebanding dengan kebutuhan penduduk untuk mendapatkan pekerjaan yang layak diberbagai sektor kehidupan, berpotensi untuk menciptakan gangguan dalam penyelenggaraan Pilpres 2014 di Kota Pontianak. Kondisi sosial ekonomi, sosial politik dan sosial budaya di Kota Pontianak yang masih rawan terhadap dinamika kehidupan demokrasi yang menyimpang dari nilai-nilai moral, agama, sosial, dan ketentuan hukum yang berlaku, dapat memicu terjadinya konflik horizontal dan/atau kejahatan berdampak kontijensi. Strategi-Strategi yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Pontianak dalam menjaga ketertiban pada penyelenggaraan pemilihan umum presiden 2014 melalui pencegahan, penangkalan dan penanggulangan kejahatan untuk menopang terlaksananya pemilihan umum presiden tahun 2014 yang kondusif dengan cara :Meningkatkan pelaksanaan fungsi kepolisian secara optimal, menjalin kemitraan Polri dengan Pemerintah Kota Pontianak, KPU Kota Pontianak, Panwaslu Kota Pontianak dan Instansi terkait, memantapkan kemitraan Polri dengan Masyarakat, serta meningkatkan kemampuan, watak, jati diri dan profesionalitas personil Polri secara berkelanjutan. Melakukan penangkalan, terhadap kondisi “ambang gangguan” kamtibmas dengan sasaran untuk mengurangi “faktor kesempatan” dan menurunkan “faktor niat” melalui pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli. Melakukan penegakan hukum terhadap "ancaman nyata" kamtibmas secara tegas, konsekuen dan konsisten berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

**Kata Kunci: Strategi Kepolisian, penyelenggaraan pemilihan president.**

## **Latar Belakang**

Pelaksanaan pemilihan umum 2014 (pesta demokrasi rakyat Indonesia) sudah selesai dilaksanakan. KPU dan aparat Kepolisian menjadi salah satu ujung tombak dari penyelenggaraan dan mengamankan jalannya pemilihan umum. Untuk itulah, setiap ada event pemilihan umum, baik secara nasional maupun pemilihan pemimpin daerah, KPU menjalin kerjasama dengan pihak Kepolisian untuk mensukseskan jalannya pemilihan umum. Kerjasama tidak sebatas pada mengamankan jalannya pemilu tetapi juga menciptakan suasana pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia.

Memang, bagi Polri sendiri adanya pesta demokrasi menjadi tantangan yang harus terselesaikan dengan baik lantaran fungsi utama Polri adalah sebagai aparat pengayom, pelindung, pelayan masyarakat, maupun penegak hukum (sesuai amanat undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) untuk menciptakan kondisi keamanan dalam negeri yang masih dirasakan sangat rumit dan beragam. Rumitnya permasalahan yang harus dihadapi teridentifikasi dari munculnya berbagai konflik antar suku, antar daerah maupun isu-isu terorisme.

Strategi Kepolisian Resort Kota Pontianak dalam memelihara kamtibmas ditinjau dari berbagai aspek utama yaitu dari aspek internal dan eksternal. Sebab, upaya untuk menciptakan kondisi kamtibmas pada hakekatnya merupakan proses yang harus melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam komunitasnya, karena kamtibmas selain merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan dalam proses pembangunan nasional, juga merupakan sosial yang harus dilakukan secara berkelanjutan.

Pada setiap proses pemilu di Indonesia tahap kampanye pemilu merupakan tahap yang paling rawan dibandingkan tahap-tahap pemilu lainnya, berdasarkan data Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2009 dan Pemilu tahun sebelumnya, pada tahap ini (kampanye Pemilu) sering terjadi benturan antar massa partai dan pendukung calon presiden dan wakil presiden peserta yang berakibat korban manusia meninggal dunia, luka berat, luka ringan, dan kerugian materiil akibat dari kecelakaan lalu lintas, pengrusakan, pembakaran dan pencurian.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) yang mempunyai tugas pokok

sebagaimana tercantum dalam pasal 13 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian negara republik indonesia adalah kepolisian nasional yang melaksanakan peran kepolisian meliputi seluruh wilayah negara republik indonesia yang dibagi dalam beberapa daerah hukum yaitu kepolisian daerah (polda), selanjutnya dibagi lagi menjadi kepolisian resort (polres), sebagai kesatuan operasional dasar polri yang berperan sebagai pelaksana utama tugas polri pada masing-masing wilayah hukumnya. Sementara itu pelaksanaan kampanye presiden dan wakil presiden dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota, maka dengan demikian kesatuan operasional dasar merupakan kesatuan yang melaksanakan pengamanan langsung kampanye pemilu dengan back up satuan atas yaitu polda ( kepolisian daerah ). kesatuan operasional dasar/polres dengan mendayagunakan satuan operasional di bawahnya yaitu bagian operasional, bagian bina mitra, satuan samapta, satuan lalu lintas, satuan intelijen dan satuan reserse kriminal untuk secara bersama-sama dan terpadu merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan rencana pengamanan kampanye pemilu presiden dan wakil presiden, dengan memperhatikan peluang dan kendala baik intern maupun ekstern Polres.

Kesuksesan pelaksanaan kampanye pemilu bukan semata-mata tanggung jawab Kesatuan operasional dasar/polres saja, namun merupakan tanggung jawab semua pihak yang berkepentingan dalam hal ini antara lain instansi pemerintah, komisi pemilihan umum kabupaten/kota, panitia pengawas pemilu kabupaten/kota, pemantau pemilu kabupaten/kota, pengurus partai peserta pemilu, tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden dan potensi masyarakat seperti halnya para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh partai, tokoh adat dan tokoh lainnya yang mempunyai kharisma di masyarakat dan bersatu padu merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, membuat kesepakatan dan konsinyes dengan memperhatikan peluang dan kendala yang ada untuk mensukseskan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden 2014 agar dapat berjalan dengan aman dan tertib, tidak terjadi konflik, baik konflik horisontal antar massa pendukung masing-masing partai maupun konflik vertikal yang mengarah kepada runtuhnya negara kesatuan republik indonesia.

Sehubungan dengan pengamanan menjelang pemilu presiden dan wakil presiden yang di laksanakan pada 9 April 2014, Polresta Pontianak gencar berlatih melalui simulasi pengamanan melekat. Simulasi digelar di tiga lokasi, di aula Polresta Pontianak, lapangan Apel Polresta, dan GOR Pangsuma Pontianak selatan dengan melibatkan 375 personel. Operasi yang kita gelar diberi nama Mantabrata Kapuas. Tiga rangkaian simulasi, pertama di aula pemberian teori oleh Satgas Ban Ops. Kemudian lapangan Apel Polresta oleh Satgas Tindak dan Satgas Ban Ops, terakhir seluruhnya akan digabungkan ke dalam bentuk simulasi inti di GOR Pangsuma. Operasi Mantabrata Kapuas ini lebih mengedepankan preventif. Selain itu untuk simulasi inti, ada beberapa yang menjadi fokus dalam operasi ini yakni Satgas Pengawasan Rute Lokasi Parkir (Walolakir) dan Satgas VVIP. Kemudian, pengawasan pengamanan tamu VVIP seperti presiden dan wakil presiden maupun pejabat negara yang datang berkunjung langsung untuk memantau jalannya pemilu, dan itu dilakukan pengawasan ketat atau melekat dari kita.

Dalam simulasi ini melibatkan seluruh satuan di lingkungan Polresta Pontianak terdiri dari 375 personel dari sat Lantas, sat Intel, dan anggota lain dari berbagai fungsi. Terkait pengamanan logistik pemilu, dilakukan juga secara ketat, baik dari KPU provinsi ke KPU kota serta penyebarannya ke TPS-TPS yang sudah ditentukan. Dari gedung KPU kita bagi 20 personel, setiap kecamatan ada 4 anggota yang mengawalinya dari KPU ke PPK kemudian dilanjutkan ke PPS. Pengawasan dan penjagaan ketat yang dilakukan pihak Polresta Pontianak, atas dasar permintaan KPU baik kota maupun provinsi. Ada 820 TPS yang akan disebarkan nanti, masing-masing TPS tempatkan satu atau dua anggota.

Bertitik tolak dari betapa pentingnya pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 bagi bangsa Indonesia, agar dapat berjalan aman dan tertib serta prediksi kerawanan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 utamanya tahap kampanye pemilu rawan terjadinya konflik, maka perlu dirumuskan sistem pengamanan pemilu tahun 2014 pada umumnya dan pada khususnya sistem pengamanan kampanye pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Polresta Pontianak dengan melibatkan seluruh satuan operasional Polresta dan dengan semua pihak yang berkepentingan di dalam pelaksanaan pemilu 2014 melakukan kegiatan-kegiatan berupa kegiatan penyelidikan intelijen, kegiatan penangkalan (pre emptif), kegiatan pencegahan (preventif), kegiatan penegakan hukum (represif), kegiatan kontijensi (kerusuhan massa), membuat kesepakatan kegiatan kampanye (jadwal, rute, lokasi, waktu kampanye) dan membuat konsinyes, yang

kesemua kegiatan dimaksud adalah untuk menjamin terlaksananya kampanye pemilu 2014 dengan aman dan tertib.

Uraian di atas menarik minat penulis untuk mengkaji secara mendalam terhadap masalah ini dalam bentuk penelitian tesis dengan judul: **STRATEGI KEPOLISIAN RESORT KOTA PONTIANAK DALAM MENJAGA KETERTIBAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIAH UMUM (Studi Pemilihan Umum Presiden 2014)**

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 di Kota Pontianak ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Pihak Kepolisian Resort Kota Pontianak sehingga memerlukan strategi yang tepat dalam menjaga ketertiban pada penyelenggaraan pemilihan umum presiden 2014 ?
3. Strategi-Strategi apa yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Pontianak dalam menjaga ketertiban pada penyelenggaraan pemilihan umum presiden 2014?

### **Pembahasan**

**Strategi Kepolisian Resort Kota Pontianak Dalam Menjaga Ketertiban Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden 2014.**

#### **1. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia Terkait Dengan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden 2014.**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipahami esensi-esensi penting , mengenai peran, fungsi dan tugas pokok Polri , yaitu :

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri [(Pasal 5 (1)).
- b. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat [Pasal 2].

- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia [Pasal 4].

Dari uraian di atas menunjukkan, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memang merupakan salah satu lembaga pemerintahan di bawah Presiden yang memiliki peran, fungsi dan tugas pokok melaksanakan urusan keamanan dalam negeri yang meliputi : (1) pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) penegakan hukum; (3) perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketiga tugas pokok tersebut sesungguhnya bukan merupakan urutan prioritas, sebab ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Disamping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Karena itu, ketiganya dirumuskan ke dalam satu istilah yang mengandung pengertian umum sebagai berikut : “Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat” [Penjelasan Pasal 13]. Jika dioperasionalisasikan terdapat elemen-elemen pokok yang dikandung pengertian Kamtibmas :

- a. Kondisi dinamis masyarakat: adalah keadaan tata kehidupan masyarakat yang penuh semangat, terus bergerak untuk menghasilkan perubahan yang membawa kemajuan.
- b. Prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional: ialah rencana pembangunan berskala nasional sebagai konsensus dan komitmen bersama masyarakat Indonesia mengenai pencapaian visi dan misi bangsa dalam kurun waktu tertentu – jangka panjang, menengah dan tahunan .

- c. Tujuan nasional, ialah: sebagaimana termaktub pada alinia keempat pembukaan UUD 1945, bahwa negara: (a) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indoneisia; (b) memajukan kesejahteraan umum; (c) mencerdaskan kehidupan bangsa; (d) ikut serta dalam perdamaian dunia. Kesemuanya itu pelaksanaanya berbasis pada landasan filosofis Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945.
- d. Terjaminnya keamanan: ialah kondisi bebas dari rasa takut pada diri setiap warga masyarakat dalam melaksanakan kehidupan berpribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari segala bentuk gangguan, hambatan, dan ancaman fisik, psikis, keselamatan jiwa, dan harta benda yang ditimbulkan oleh perbuatan kriminal maupun anti sosial.
- e. Ketertiban: ialah keteraturan melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan yang diatur berdasarkan hukum, norma agama, norma sosial, dan norma-norma lainnya yang berlaku.
- f. Tegaknya hukum: ialah: “...*suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan*” . Keinginan hukum tiada lain adalah keinginan rakyat yang dinormatiskan ke dalam peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan hukum berupa ketertiban, ketentraman, kedamaian, kebenaran, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
- g. Terbinanya ketenteraman, yang mengandung: (1) kemampuan membina kedamaian tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (2) mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum; dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Dalam mengemban fungsi kepolisian, Polri dibantu oleh : (a) kepolisian khusus ; (b) penyidik pegawai negeri sipil; (c) bentuk-bentuk pengamana swakarsa [Pasal 3]. Kepolisian khusus dan penyidik pegawai negeri sipil diangkat oleh masing-masing departemen-departemen pemerintahan. Namun dalam pelaksanaan tugasnya tetap berada di bawah pembinaan dan koordinasi Polri.

Dalam rangka mengantisipasi potensi kerawanan yang terjadi pada tahap inti Pilpres 2014 di kota Pontianak, agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata, Polri telah menyiapkan langkah – langkah antisipasi, sebagai berikut :

- 1). Distribusi Logistik
  - a. Kerawanan



- Distribusi logistik terlambat;
  - Peralatan / perlengkapan dicuri, digandakan, dipalsukan, dibakar;
  - Korupsi penyediaan peralatan / perlengkapan dan pendistribusian;
- b. Cara bertindak
- Penjagaan TMP percetakan dan penyimpanan logistik Pemilu;
  - Pengawasan distribusi logistik sampai ke TPS;
  - Menindak pihak yang mengganggu / hambat distribusi logistik Pemilu.
- 2). Kampanye
- a. Kerawanan
- Protes parpol kepada Parpol lain;
  - Protes parpol kepada Penyelenggara Pemilu;
  - Rusuh massal / sabotase / teror / ancaman / penculikan;
  - Pelanggaran, kecelakaan dan kemacetan lalu lintas;
  - Kejahatan konvensional lainnya.
- b. Cara Bertindak
- Penjagaan TMP percetakan dan penyimpanan logistik Pemilu;
  - Pengawasan distribusi logistik sampai ke TPS;
  - Menindak pihak yang mengganggu / hambat distribusi logistik Pemilu.
- 3). Masa Tenang
- a. Kerawanan
- Sabotase / teror / pengancaman / penculikan;
  - *Money politic, black campaign*;
  - Kecurangan tertentu;
  - Isu sara;
  - Kejahatan konvensional lainnya.
- b. Cara bertindak
- Sosialisasi dan himbauan terhadap para calon, kader & tim suksesnya agar tidak melakukan aktifitas politik;
  - Deteksi dini kemungkinan adanya ancaman dan gangguan keamanan;
  - Pengaturan dan penjagaan pada lokasi / tempat rawan untuk mencegah munculnya gangguan keamanan;
  - Pengamanan proses pembersihan tanda gambar partai politik;
  - Tindak pihak yang mengganggu masa tenang;
  - Deteksi kemungkinan adanya *money politic* / serangan fajar.
- 4). Pemungutan Suara

a. Kerawanan

- Protes dan unjuk rasa;
- Sabotase / teror / pengancaman;
- *Money politic*;
- Manipulasi / penggelembungan suara;
- Intimidasi dan pemaksaan;
- Penolakan hasil penghitungan suara;
- Kejahatan konvensional lainnya.

b. Cara bertindak

- Deteksi kemungkinan adanya ancaman dan gangguan;
- Pengamanan TPS, secara terbuka maupun tertutup;
- Patroli dan pemantauan di sekitar TPS;
- Tindak pihak yang mengganggu pelaksanaan pemungutan suara;
- Mengawal dan mengamankan kotak suara serta administrasinya.

5. Rekapitulasi dan Penghitungan Suara

a. Kerawanan

- Protes dari elemen masyarakat;
- Sabotase / teror / pengancaman;
- *Money politic*;
- Manipulasi / penggelembungan suara;
- Unjuk rasa;
- Kejahatan konvensional lainnya.

b. Cara bertindak

- Deteksi kemungkinan adanya ancaman dan gangguan;
- Melaksanakan patroli dan penjagaan di lokasi perhitungan suara;
- Melaksanakan pengamanan kantor pemerintahan dan obyek vital serta pusat perekonomian.

6). Penetapan Calon Terpilih

a. Kerawanan

- Penolakan hasil penghitungan;
- Pengerahan massa;
- Penculikan;
- Pembakaran;

- Sabotase.

b. Cara bertindak

- Deteksi dini kemungkinan adanya ancaman dan gangguan;
- Pengamanan terbuka dan tertutup dengan kegiatan sterilisasi KPU, KPUD, Bawaslu, dan TMP lain yang dianggap rawan serta pusat perekonomian.

7). Pelantikan Sumpah Janji

a. Kerawanan

- Unjuk rasa;
- Sabotase / teror / pengancaman / penculikan;
- Kejahatan konvensional lainnya.

b. Cara bertindak

- Deteksi dini kemungkinan adanya ancaman dan gangguan keamanan;
- Pengamanan dengan kegiatan sterilisasi, pengaturan, penjagaan dan patroli pada kantor pemerintah, KPU, KPUD, DPR, DPD, DPRD;
- Melaksanakan penjagaan dan pengawasan terhadap calon terpilih yang akan dilantik;
- Tindak pihak yang mengganggu pelaksanaan pelantikan calon terpilih.

**2. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Polresta Pontianak Dalam Menjaga Ketertiban Pada Penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014.**

**a. Upaya Kerja sama antara Polresta dan polsek-polsek yang ada di wilayah hukum Kota Pontianak :**

- Berkoordinasi dengan kekuatan antara Polresta Dan Polsek di tempat di daerah berlangsungnya Pemilu Presiden 2014.
- Berkoordinasi Bagian Operasi dengan Bagian Binamitra.
- Berkoordinasi Bagian Operasi dengan Bagian Administrasi.
- Berkoordinasi Bagian Operasi dengan Satuan Lalu Lintas.
- Koordinasi Bagian Operasi dengan Satuan Samapta.
- Koordinasi Bagian Operasi dengan Satuan Reserse Kriminil.
- Koordinasi Bagian Operasi dengan Satuan Narkotika dan obat berbahaya lainnya.

- Koordinasi Bagian Operasi dengan Sentra Pelayanan Kepolisian ( SPK ).
- Koordinasi Bagian Operasi dengan Urusan Telematika.
- Koordinasi Bagian Operasi dengan Unit Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin.
- Koordinasi Bagian Operasi dengan Tata Urusan Dalam.
- Koordinasi Bagian Operasi dengan Satuan Pengamanan Obyek Vital.
- Koordinasi Bagian Operasi dengan Satuan Pengamanan Pariwisata.
- Koordinasi Bagian Operasi dengan Satuan atau Unit Polisi Perairan.
- Koordinasi Bagian Operasi dengan Seksi Kedokteran dan Kesehatan.

**b. Upaya Kerja Sama kepolisian dan dengan Instansi Pemerintah Kota Pontianak.**

Guna mewujudkan pelaksanaan kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak berjalan aman dan sukses Kepolisian perlu bekerja sama dan bekerja bersama-sama dengan instansi pemerintah yang terkait dan mendayagunakan potensi masyarakat yang ada, antara lain :

**a).Koordinasi Polresta dengan KPU Kota Pontianak.**

- 1) Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya terjadi perpecahan di beberapa partai besar yang hingga saat ini belum tuntas penyelesaiannya maka pada saat penyelenggaraan Kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak dijadwalkan pelaksanaannya tidak bersamaan waktunya (dipisahkan), untuk menghindari konflik horisontal maupun vertikal, disini Polresta diharapkan dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten / Kota.
- 2) Penentuan sangsi oleh KPU kepada partai peserta kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak yang melanggar ketentuan sehingga berakibat penghentian kampanye selama masa kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak, sebelumnya dikoordinasikan dengan Polresta Pontianak.
- 3) Penyerahan pelanggaran yang mengandung unsur pidana kepada penyidik oleh KPU untuk dilaksanakan penyidikan kiranya perlu diperhatikan syarat-syarat formil penyidikan yang akan dilaksanakan oleh Polri yaitu adanya tersangka / pelaku, saksi-saksi dan barang bukti.

- 4) Untuk mengeliminir pelanggaran pelaksanaan kampanye dan pelanggaran yang mengandung unsur pidana maka perlu adanya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak oleh KPU Kota Pontianak dan Polresta Pontianak.

**b). Koordinasi Polresta Pontianak dengan Panwaslu Kota Pontianak.**

- 1) Penyerahan melalui KPU tentang telah terjadinya pelanggaran yang mengandung pidana untuk dilakukan penyidikan diharapkan memenuhi syarat formil yaitu adanya pelaku/tersangka, saksi-saksi dan barang bukti.
- 2) Penunjukan anggota Polri yang duduk dalam Panwaslu dikoordinasikan terlebih dahulu.
- 3) Dalam rangka menjalankan pemantauan pelaksanaan kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak bersama-sama dengan Polresta Pontianak.
- 4) Bagi Pamatau yang berasal dari perwakilan pemerintahan luar negeri agar melaporkan keberadaanya ke Polresta Pontianak.

**d). Koordinasi Pelretsa dengan Pengurus Partai/Calon Pasangan Peserta Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak.**

- 1) Pengamanan juru kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak.
- 2) Pengamanan tokoh-tokoh partai atau tamu VIP yang hadir dalam kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak.
- 3) Pengamanan lokasi dilaksanakannya kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak.
- 4) Pengamanan tempat berkumpul massa partai peserta kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak sebelum berangkat ke lokasi kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak.
- 5) Pengamanan route massa partai peserta kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak pada saat berangkat dan kembali.
- 6) Pengamanan penyebaran dan atau penempelan tanda gambar partai peserta kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak kepada dan di tempat umum.
- 7) Pengamanan kantor, sarana dan prasarana partai peserta kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak selama kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak.

- 8) Pengamanan tempat tinggal pengurus partai peserta kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak.
- 9) Pelibatan Satuan Penugasan (Sat Gas) partai peserta kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak dalam pelaksanaan pengamanan kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak dibawah kendali Polresta.
- 10) Perijinan / pemberitahuan kepada Polresta sebelum dilaksanakannya kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak untuk diantisipasi lebih awal.
- 11) Dalam rangka memenuhi syarat formal proses penyidikan atas pelanggaran yang mengandung pidana yang dilakukan baik oleh panitia kampanye maupun massa partai peserta kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak.

**e). Koordinasi Polresta dengan Pemerintahan Kota Pontianak.**

- 1) Bagian Hukum Pemerintahan Kota Pontianak.
  - a) Melaksanakan penerangan kepada masyarakat tentang pelaksanaan Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak dapat dilaksanakan dengan tertib dan aman.
  - b) Sosialisasi Undang-undang Pemilihan Umum.
  - c) Merumuskan unsur-unsur pidana dalam Undang-undang Pemilihan Umum.
- 2) Dinas Pekerjaan Umum Pemerintahan Kota Pontianak.
  - a) Penyediaan tempat / lokasi yang akan digunakan sebagai lokasi kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak ditinjau dari segi keamanan bagi masyarakat sekitar lokasi kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak dan bagi partai peserta kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak.
  - b) Penyediaan tempat/lokasi penempatan/penempelan tanda gambar partai peserta kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak.
  - c) Melaksanakan pengecekan kondisi jalan dari dan menuju ke lokasi kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak.
- 3) Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Pemerintahan Kota Pontianak.

- a) Bersama-sama dengan Satuan Lalu Lintas Polresta Pontianak melaksanakan pengamanan dan pengaturan lalu lintas di lokasi kampanye maupun route dari dan menuju lokasi kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak.
  - b) Melakukan pengalihan arus lalu lintas bilamana terjadi kemacetan lalu lintas pada saat kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak.
  - c) Menertibkan kendaraan baik roda 2 (dua) maupun 4 (empat) yang digunakan untuk kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak selama berlangsungnya kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak.
  - d) Melaksanakan pengawalan juru kampanye dan atau VIP atas permintaan panitia penyelenggara.
- 4) Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintahan Kota Pontianak.
- a) Menyiagakan personil dan kendaraan pemadam kebakaran untukantisipasi terjadinya kebakaran dan atau menghalau massa pada saat terjadi kerusuhan.
  - b) Mendatakan kendaraan pemadam kebakaran yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan negara / daerah dan swasta yang dapat digunakan / disiagakan untuk kepentingan pengamanan kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak.
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintahan Kota Pontianak.
- a) Penertiban pedagang kaki lima disekitar lokasi kampanye dan atau ruas-ruas jalan dari dan menuju lokasi kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak, agar tidak mengganggu arus lalu lintas.
  - b) Melaksanakan patroli di daerah rawan konflik antar massa pendukung partai peserta kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak.
  - c) Pengamanan kantor instansi pemerintah dan fasilitas umum milik pemerintah.
  - d) Melaksanakan pengawasan terhadap alat peraga partai peserta pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak di tempat umum.
- 6) Pertahanan Sipil (Hansip) Pemerintahan Kota Pontianak.
- a) Pengaturan dan penjagaan massa partai peserta kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak di lokasi kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak.

- b) Pengamanan tempat transit juru kampanye, panggung kampanye, tempat hiburan selama kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak berlangsung.
- c) Pengaturan dan pengamanan kendaraan peserta kampanye di lokasi parkir.
- d) Pengamanan masyarakat di sekitar lokasi kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak.
- e) Pengamanan massa partai peserta kampanye dari gangguan masyarakat di sekitar lokasi kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak.

**f). Koordinasi Polretas dengan Komando Distrik Militer ( POLRESIM).**

- 1) Informasi dari Intel Polresim tentang perkembangan situasi masyarakat selama pelaksanaan kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak, dalam kegiatan penangkalan ( pre-emptif ).
- 2) Pelaksanaan patroli dan penjagaan di daerah rawan konflik antar massa partai peserta kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak, dalam kegiatan pencegahan ( preventif ).
- 3) Pelaksanaan pengamanan kegiatan kampanye di lokasi kampanye, dan bilamana terjadi kejahatan dalam pelaksanaannya, penegakan hukum dilaksanakan oleh Polri.

**g). Koordinasi Polresta dengan Kejaksaan Negeri.**

- 1) Informasi dari Intel kejaksaan tentang perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak oleh partai peserta kampanye selama pelaksanaannya.
- 2) Percepatan penyelesaian penyidikan berkas perkara tindak pidana Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak dan atau tindak pidana yang berkaitan dengan Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak.
- 3) Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai anggota Panitia Pengawas Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak.

**h). Koordinasi Polresta dengan Pengadilan Negeri Pontianak.**

- 1) Percepatan penyelesaian penyidikan berkas dalam hal surat persetujuan dan atau surat ijin penyitaan barang bukti.



- 2) Informasi perkembangan persidangan kasus tindak pidana Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak.

**i). Koordinasi Polresta dengan Potensi Masyarakat.**

- 1) Tokoh Agama / ulama.
  - a) Penyampaian pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat melalui dakwah-dakwah keagamaan.
  - b) Penciptaan suasana sejuk dan harmonis di antara pemeluk agama.
  - c) Ikut serta dalam penyelesaian konflik massa pendukung partai melalui pesan-pesan agama.
- 2) Tokoh Pemuda.
  - a) Penyampaian pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat khususnya pemuda melalui kegiatan-kegiatan kepemudaan.
  - b) Penciptaan suasana damai di antara para pemuda dan remaja.
  - c) Ikut serta dalam penyelesaian konflik antar massa pendukung partai peserta kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak melalui jalur kepemudaan.
- 3) Tokoh Masyarakat.
  - a) Penyampaian pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat.
  - b) Penciptaan suasana saling menghargai perbedaan pendapat dan atau pilihan serta dukungan seorang kepada salah satu partai peserta kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak.
  - c) Ikut serta dalam penyelesaian konflik antar massa pendukung partai peserta kampanye dengan kekuatan kharismaniknya di masyarakat.
- 4) Tokoh Adat.
  - a) Penyampaian pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan adat istiadat daerah.
  - b) Penciptaan suasana saling menghargai perbedaan pendapat, pilihan dan dukungan seseorang atau kelompok kepada salah satu partai peserta kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak.

- c) Ikut serta dalam penyelesaian konflik antar massa pendukung calon kepala daerah pada kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak dengan pendekatan adat.

Dengan memperhatikan prediksi pelanggaran dan kejahatan Pilpres tahun 2014 di kota Pontianak yang dimungkinkan terjadi serta dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengamanan kampanye baik berupa kekuatan, kelemahan, peluang maupun kendala intern dan ekstern Kepolisian Resort Kota Pontianak maka dapat dirumuskan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Pontianak dan merupakan suatu sistem atau rangkaian kegiatan pengamanan selama penyelenggaraan Pilpres adalah sebagai berikut :

#### **1. Kegiatan Mewujudkan Situasi Kampanye yang Kondusif.**

Sebelum memasuki masa kampanye terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Kepolisian Resort Kota Pontianak, untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif yaitu dengan melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan dan atau operasi Kepolisian antara lain :

##### **a. Melaksanakan Operasi Inteljen.**

Yaitu operasi Kepolisian yang kegiatannya diarahkan untuk mendeteksi berbagai kerawanan yang terjadi didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dapat mengancam stabilitas nasional. Berkaitan dengan situasi menjelang kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak maka kegiatannya diarahkan untuk mendapatkan bahan keterangan mengenai gejala/gelagat perkembangan kehidupan masyarakat dalam bidang sosial politik, antara lain :

- 1) Sikap dan perilaku masyarakat dalam melaksanakan politik praktis.
- 2) Pertumbuhan dan perkembangan partai politik dalam masyarakat.
- 3) Perkembangan kegiatan politik praktis dalam masyarakat dan sikap serta tanggapan yang timbul terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dibidang politik.

- 4) Kegiatan politik dan tokoh-tokoh masyarakat (pemuka masyarakat, tokoh-tokoh eks partai politik, tokoh-tokoh masyarakat tertentu).
- 5) Kegiatan dan sikap politik golongan-golongan ekstrim yang ada (ekstrim kiri, kanan dan lain-lain ).
- 6) Sikap dan tanggapan negatif dari kelompok-kelompok pemuda / mahasiswa terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah.
- 7) Melakukan penggalangan kepada tokoh-tokoh masyarakat agar mendukung dan mengamankan semua kebijaksanaan yang akan / telah digariskan pimpinan Polri di pusat maupun daerah / wilayah yang berkaitan dengan pengamanan kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak.

Kegiatan operasi inteljen dapat berupa penyelidikan inteljen yang bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan keterangan untuk kepentingan taktis yaitu untuk menentukan tindakan-tindakan yang akan diambil dengan resiko yang diperhitungkan dan untuk menentukan cara bagaimana mempergunakan sarana-sarana yang ada di Kepolisian Resort Kota Pontianak secara berdaya guna dan berhasil guna dalam masa kampanye.

b. Melaksanakan Operasi Simpatik Lalu Lintas.

Yaitu operasi Kepolisian yang kegiatannya diarahkan untuk menciptakan situasi tertib berlalu lintas, bagi para pemakai jalan dengan harapan pada saat pelaksanaan kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak yang sarat dengan kegiatan konvoi kendaraan bermotor baik roda 2 ( dua ), roda 4 (empat) atau lebih dapat dilaksanakan dengan tertib dan lancar terkendali dan tidak didapati pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas. Selama pelaksanaan operasi simpatik lalu lintas, selain untuk mendisiplinkan masyarakat pemakai jalan, juga sekaligus menertibkan rambu-rambu lalu lintas yang ada dan menertibkan pedagang kaki lima yang menggunakan baku jalan, untuk pelaksanaannya melibatkan satuan operasional Polri/Polresta diluar Satuan Lalu Lintas dan dukungan instansi pemerintah Kota Pontianak dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.

c. Melaksanakan Operasi Senjata Tajam dan Senjata Api.

Yaitu Operasi Kepolisian yang kegiatannya diarahkan untuk mengendalikan penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api serta alat pemukul lainnya yang digunakan sebagai alat melakukan kejahatan. Dengan harapan pada saat pelaksanaan kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak tidak ditemukan kejahatan penyalahgunaan senjata tajam, senjata api baik yang dilakukan oleh panitia penyelenggara kampanye maupun massa simpatisan partai peserta kampanye dan masyarakat lainnya, agar tercipta situasi Kamtibmas yang kondusif.

d. Melaksanakan Operasi Penyakit Masyarakat ( Pekat ).

Yaitu operasi Kepolisian yang kegiatannya diarahkan untuk mengendalikan berbagai aktivitas masyarakat yang dikategorikan penyakit masyarakat antara lain : minum-minuman keras di tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum, Penjaja Seks Komersial (PSK), gelandangan dan pengemis jalanan (Gepeng), perjudian, dengan harapan pada saat memasuki masa kampanye tidak mengganggu ketertiban umum. Selain keempat operasi Kepolisian diatas, dapat dilaksanakan operasi Kepolisian lainnya yang bertujuan untuk menciptakan situasi dan kondisi kamtibmas yang kondusif menjelang, pada masa kampanye dan pasca kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak.

**2. Kegiatan pembuatan kesepakatan antar partai politik/tim sukses peserta Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak.**

Sebelum dilaksanakan kampanye, seluruh pengurus partai politik tim sukses calon dan Komandan Satuan Penugasan ( Dansatgas ) partai diundang di Mapolresta untuk membuat kesepakatan bersama tentang langkah-langkah penciptaan situasi kondusif (aman dan tertib) selama pelaksanaan kampanye. Kesepakatan dimaksud bersifat mengikat kepada seluruh partai peserta Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak,

hal ini dilakukan dengan harapan tidak terjadi pelanggaran kampanye selama kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak berlangsung.

Kesepakatan yang dibuat oleh para pengurus partai peserta Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak dan Komandan Satuan Penugasan masing-masing partai setidaknya tidaknya memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak merupakan hak seluruh peserta Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak yang harus dihormati pelaksanaannya.
- b. Selama pelaksanaan kampanye, oleh salah satu partai peserta kampanye maka partai peserta Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak lainnya berupaya mengamankan massa simpatisan partainya untuk tidak mengganggu partai yang sedang melaksanakan kampanye.
- c. Pada saat melaksanakan kampanye, penyelenggara kampanye wajib menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan kelancaran lalu lintas baik di tempat berkumpul, sepanjang route yang dilewati dan di lokasi kampanye.
- d. Komandan Satuan Penugasan Partai (Dansatgas) dapat mengikutsertakan anggotanya dalam pengamanan kampanye oleh partai lainnya.
- e. Kendali Satuan Penugasan Partai (Satgas Parti) selama mengikuti pengamanan kampanye diserahkan kepada Polri.
- f. Pada kesempatan pertama melaporkan kepada Polri tentang adanya indikasi konflik antar massa simpatisan partai dan ikut serta dalam penyelesaiannya.

### **3. Kegiatan Pembentukan Kekuatan Gabungan.**

Dalam rangka mewujudkan sukses pengamanan Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak bukan semata-mata tanggung jawab Polri dalam hal ini Polresta saja, namun merupakan tanggung jawab semua pihak yang berkepentingan antara lain instansi pemerintah, Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak, Panitia Pengawas Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak, Pengamat Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak, Partai Peserta Kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak dan Potensi

Masyarakat, maka pelibatan kekuatan perlu diorganisir agar menjadi satu kekuatan yang utuh dan terarah selama pengamanan kampanye.

Karena Polresta Pontianak adalah lembaga negara yang paling bertanggung jawab dalam penciptaan keamanan selama kampanye maka inisiatif penggabungan harus berasal Polresta dengan sendirinya Polresta harus aktif dalam proses pembentukan kekuatan gabungan. Adapun kekuatan gabungan dapat dirinci sebagai berikut :

a. Kekuatan Kesatuan Operasional Dasar .

- 1) Kekuatan Satuan Intelkam.
- 2) Kekuatan Bagian Binamitra.
- 3) Kekuatan Satuan Samapta.
- 4) Kekuatan Satuan Lalu Lintas.
- 5) Kekuatan Satuan Reserse Kriminil dan Satuan Narkoba.
- 6) Kekuatan Satuan Cadangan.
- 7) Kekuatan Satuan Pendukung.

b. Kekuatan Instansi Pemerintah.

- 1) Kekuatan anggota Polresim.
- 2) Kekuatan Satpol PP Kota Pontianak.
- 3) Kekuatan DLLAJ Kota Pontianak.
- 4) Kekuatan Dinas P.U Kota Pontianak.
- 5) Kekuatan Dinas PMK Kota Pontianak.
- 6) Kekuatan Dinas Kesehatan Kota Pontianak.
- 7) Kekuatan Hansip Kota Pontianak.
- 8) Kekuatan Bagian Hukum Kota Pontianak.
- 9) Kekuatan Pegawai Kejaksaan Negeri (Intel Kejaksaan dan Penuntut Umum).
- 10) Kekuatan Pegawai Pengadilan Negeri.

c. Kekuatan Lembaga Penyelenggara Kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak.

- 1) Kekuatan anggota KPU Kabupaten / Kota.
- 2) Kekuatan anggota Panwaslu Kabupaten / Kota.
- 3) Kekuatan anggota Pamatlu Kabupaten / Kota.

- d. Kekuatan Partai Peserta Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak.
  - 1) Kekuatan pengurus partai peserta Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak.
  - 2) Kekuatan Satuan Penugasan (Satgas) partai.
- e. Kekuatan Potensi Masyarakat.
  - 1) Kekuatan para tokoh masyarakat.
  - 2) Kekuatan para tokoh ulama / agama.
  - 3) Kekuatan para tokoh pemuda.
  - 4) Kekuatan para tokoh adat.
- f. Kekuatan Organisasi Kemasyarakatan lainnya.
  - 1) Kekuatan anggota FKPP.
  - 2) Kekuatan anggota Rapi.
  - 3) Kekuatan anggota Orari.
  - 4) Kekuatan anggota Satpam.
  - 5) Kekuatan anggota Pramuka.
  - 6) Kekuatan anggota Panca Marga.
  - 7) Dan lain-lain kekuatan yang ada di Polresta Pontianak.

Dari kekuatan-kekuatan yang ada di tingkat Polresta Pontianak agar didatangkan dan dikoordinir sesuai dengan fungsi, peran, tugasnya masing-masing dalam rangka mendukung dan membentuk sistem pengamanan kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak secara terpadu.

#### **4. Kegiatan Penangkalan ( Pre-emptif ).**

Yaitu kegiatan yang bersifat penangkalan melalui upaya penataan aspek-aspek kehidupan, pembinaan serta bimbingan terhadap masyarakat, agar masyarakat memiliki daya tangkal dan daya lawan serta tidak mudah terpengaruh oleh berbagai ancaman dan sekaligus dalam rangka mewujudkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan stabilitas keamanan dalam negeri.

Dalam kegiatan penangkalan (pre-emptif) satuan operasional Polri yang dikedepankan yaitu Bagian Binamitra dan atau satuan operasional lainnya yang mengemban fungsi pembinaan dan bimbingan masyarakat dengan harapan pada saat

memasuki masa kampanye timbul kepedulian masyarakat dalam penciptaan situasi Kamtibmas yang kondusif. Selain itu perlu keikutsertaan instansi pemerintah dan potensi masyarakat dalam kegiatan penangkalan (pre-emptif) dimaksud, seperti halnya : Bagian Hukum pemerintahan Kabupaten / Kota, Pegawai Kejaksaan Negeri dalam rangka bimbingan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Selain melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, kegiatan penangkalan dapat dilaksanakan melalui pemasangan spanduk-spanduk, penyebaran pamflet-pamflet/selebaran-selebaran yang berisi himbauan penciptaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam menghadapi kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak. Terhadap tokoh-tokoh ulama/agama dengan menitipkan pesan-pesan kamtibmas agar disampaikan pada saat memberikan dakwah, kebaktian, dan lain-lain kepada umatnya, demikian juga terhadap tokoh masyarakat lainnya pesan-pesan kamtibmas dapat dititipkan untuk disampaikan kepada masyarakat dalam acara kemasyarakatan.

## **5 . Kegiatan Pencegahan ( Preventif ).**

Yaitu kegiatan yang diarahkan untuk mencegah dan mengeliminir perkembangan dan berubahnya hakikat ancaman kamtibmas dari ancaman potensial menjadi ancaman kamtibmas. Dalam Kesatuan Operasional Dasar (Polresta) Satuan Operasional Polri yang dikedepankan dalam kegiatan pencegahan (preventif) yaitu Satuan Samapta dan Satuan Lalu Lintas didukung oleh satuan operasional Polri lainnya yaitu Satuan Reserse Kriminal, Satuan Intelkam dan Satuan Narkoba serta Bagian Binamitra.

Kegiatan pencegahan ( preventif ) dilaksanakan sejak pra kampanye, masa kampanye sampai dengan purna kampanye dengan sistim pengamanan yang berbeda disesuaikan dengan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dihadapi. Dari 7 (tujuh) bentuk pelaksanaan kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak dapat dikelompokkan menjadi 3 ( tiga ) kelompok sistim pengamanan antara lain:

- a. Sistim pengamanan kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak dengan bentuk rapat umum, tatap muka dan pertemuan terbatas.



- b. Sistim pengamanan kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak dengan bentuk penyiaran melalui radio dan atau televisi.
- c. Sistim pengamanan kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak dengan bentuk penyebaran melalui media cetak dan media elektronik serta pemasangan alat peraga di tempat umum.

Dari ketiga pengelompokan sistim pengamanan tersebut, kegiatan pencegahan (preventif) yang dilaksanakan adalah berbeda disesuaikan dengan sasaran pengamanan masing-masing, dan yang paling rawan dan membutuhkan perkuatan maksimal baik dari Polresta maupun dukungan instansi pemerintah dan potensi masyarakat adalah sistim pengamanan kampanye dengan bentuk rapat umum, tatap muka dan pertemuan terbatas karena melibatkan massa partai yang berdatangan dan atau didatangkan dari berbagai tempat menuju satu lokasi kampanye.

Panitia penyelenggara kampanye (pengurus partai peserta kampanye) sebelum melaksanakan kampanye membuat surat pemberitahuan kepada Kapolres melalui Kasat Intelkam paling lambat 3 x 24 ( tiga kali dua puluh empat ) jam sebelum hari " H " jam " J " pelaksanaan kampanye, disarankan pemberitahuan dimaksud dilakukan lebih awal yaitu setidaknya 7 x 24 ( tujuh kali dua puluh empat ) jam sebelumnya, dengan harapan dapat memberi kesempatan waktu bagi Polri dan aparat keamanan lainnya, berkoordinasi, merencanakan dan mempersiapkan sistim pengamanan yang akan dilaksanakan.

Dalam surat pemberitahuan tentang akan dilaksanakan kampanye pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak yang ditujukan kepada Polri setempat, disertai penjelasan mengenai :

- a. Maksud dan tujuan kegiatan ( kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak ).
- b. Tempat berkumpulnya massa peserta kampanye.
- c. Lokasi kampanye.

- d. Route yang dilalui massa peserta kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak.
- e. Waktu dan lamanya kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak.
- f. Bentuk kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak.
- g. Penanggung jawab kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak.
- h. Nama, alamat partai penyelenggara kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak.
- i. Alat peraga yang digunakan
- j. Jumlah massa peserta kampanye pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak.

Setelah menerima surat pemberitahuan dimaksud, Kasat Intelkam melaporkan kepada Kapolrest dan atas perintah Kapolrest, Kasat Intelkam memberikan Surat Tanda Pemberitahuan Kampanye kepada panitia penyelenggara, dengan tembusan surat ditujukan kepada berbagai instansi pemerintah dan atau lembaga lainnya yang berkepentingan serta kepada Satuan Atas (Polda) dan Kabagops Polrest untuk disiapkan perencanaan sistim pengamanan kampanye, sebagai berikut :

a. Umum.

- 1) Hari " H " jam " J - 3 " petugas pengamanan sudah menempati lokasi pengamanan kampanye sesuai " plotting " masing-masing.
- 2) Kepala pengamanan obyek / sektor melaksanakan APP dan mengecek jumlah kekuatan anggota dan perlengkapan yang digunakan dalam pengamanan.
- 3) Kepala pengamanan obyek mengawasi dan mengendalikan anggota / petugas pelaksana pengamanan dan melaporkan secara berjenjang perkembangan situasi di obyek / sektor pengamanannya.

b. Bagian Operasi.

- 1) Mempersiapkan surat perintah tugas pengamanan.
- 2) Setting kekuatan petugas pada obyek / sektor pengamanan.
- 3) Mengecek penempatan petugas sesuai obyek / sektor yang telah ditentukan dalam setting kekuatan.

- 4) Mengecek pelaksanaan pengamanan kampanye di masing-masing sektor / obyek melalui Kepala Sektor / Obyek dan melaporkan setiap perkembangan yang terjadi selama pengamanan kampanye kepada Kapolres.
- 5) Membuat laporan akhir pelaksanaan kampanye pada hari " H " ke Satuan atas (Pold ) atas petunjuk Kapolres.

c. Bagian Bina Mitra.

- 1) Melaksanakan penerangan dan himbauan dengan pengeras suara kepada massa peserta kampanye di tempat berkumpul sebelum berangkat, di sepanjang route yang di lewati dan di lokasi kampanye agar massa kampanye melaksanakan kampanye dengan tertib, tidak melanggar peraturan lalu lintas dan mengutamakan keamanan diri pribadi dan orang lain.
- 2) Mengecek kesiapan Satuan Pengamanan ( Satpam ) proyek vital / obyek vital, pertokoan, pemukiman baik di sepanjang route yang di lewati massa kampanye maupun di sekitar lokasi kampanye agar meningkatkan kewaspadaan pengawasan dan penjagaannya proyek / obyek vital, serta membantu kelancaran arus lalu lintas di sekitar tempat pengamanannya.
- 3) Menghimbau kepada para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh partai agar ikut serta dalam upaya pengamanan selama pelaksanaan kampanye pada hari " H " dengan melakukan pengamatan, pengawasan dan pengendalian warga masyarakat baik yang sedang melaksanakan kampanye maupun yang tidak ikut serta dalam kampanye, untuk saling menghormati perbedaan pendapat / pilihan sesuai keinginan masing-masing warga masyarakat.
- 4) Mengecek kesiapan kekuatan pramuka yang ikut serta dalam pengamanan kampanye untuk membantu pengamanan di lokasi kampanye maupun di ruas-ruas jalan dalam rangka membantu kelancaran arus lalu lintas.
- 5) Mengecek kesiapan kendaraan pemadam kebakaran baik di lokasi kampanye maupun di tempat-tempat tertentu yang disiagakan yang berasal dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten / Kota maupun dari perusahaan-perusahaan yang diikut sertakan dalam pengamanan kampanye, pengendaliannya oleh Kabag Ops atas perintah Kapolres.
- 6) Mengecek kesiapan Satuan Penugasan ( Sat gas ) partai peserta kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak yang sedang melaksanakan kampanye

maupun Satuan Penugasan ( Sat gas ) partai lain yang ikut berperan serta dalam pengamanan kampanye, yang melaksanakan pengamanan di lokasi kampanye, di sekitar lokasi kampanye dan di ruas-ruas jalan yang dilalui peserta kampanye yang dalam pelaksanaannya dikendalikan oleh Kepala Obyek / Sektor Pengamanan dan atau Kabag Ops.

- 7) Mengecek kesiapan petugas Orari dan Rapi yang ikut serta dalam pengamanan kampanye, untuk memberikan informasi melalui alat komunikasi elektronik ke Pos Pengamanan ( Pospam ) kampanye tentang perkembangan situasi, dalam pelaksanaannya dikendalikan oleh Ka Ur telematika dan atau oleh Ka Pospam kampanye.

d. Bagian Administrasi.

- 1) Menyiagakan kekuatan cadangan staf di Mapolres sewaktu-waktu digunakan untuk menambah kekuatan di lapangan atas perintah Kapolres.
- 2) Menyiapkan dukungan logistik petugas pengamanan baik yang di lapangan maupun yang siaga di Mapolres.
- 3) Menyiagakan senjata api dan amunisi yang digunakan dalam pengamanan sesuai perintah Kapolres.

e. Satuan Inteljen Keamanan.

- 1) Melaksanakan koordinasi dengan panitia penyelenggara kampanye tentang hal-hal teknis :
  - a) Materi kampanye (agar tidak menyimpang).
  - b) Jadwal acara kegiatan kampanye sesuai waktu yang ditentukan.
  - c) Ketentuan-ketentuan dalam kampanye (harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan).
- 2) Melaksanakan pengawasan dan pencatatan kronologis jalannya kampanye.
- 3) Melaksanakan pengamanan tertutup terhadap panitia penyelenggara, juru kampanye dan tamu VIP.
- 4) Melaksanakan pencatatan pelanggaran kampanye.
- 5) Melaksanakan penyelidikan secara tertutup kemungkinan adanya sabotase, teror, intimidasi terhadap panitia penyelenggara, juru kampanye, massa kampanye atau sebaliknya melakukan sabotase, teror dan intimidasi kepada masyarakat.
- 6) Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan kampanye kepada Kapolres.

f. Satuan Samapta.

- 1) Mempersiapkan kekuatan Sat Samapta yang bertugas pengamanan di lokasi kampanye, bertugas mengawal juru kampanye atau VIP bersama-sama dengan Sat Lantas dan Sat gas partai serta Satpol PP dan Hansip Kabupaten / Kota.
- 2) Bertugas di proyek vital / obyek vital di sekitar lokasi kampanye dan atau sepanjang route yang di lewati massa kampanye.
- 3) Mengendalikan Satuan penugasan (Sat gas) partai peserta kampanye dan atau Sat gas partai lain yang ikut serta dalam pengamanan saat itu, agar berada dalam satu perintah / komando.
- 4) Bilamana terdapat lebih dari 1 ( satu ) partai yang melaksanakan kampanye pada hari dan jam yang sama maka disiapkan pasukan Samapta yang bertugas membatasi / menyekat daerah kampanye agar partai yang melaksanakan kampanye tidak bertemu pada satu titik, hal ini harus dihindari karena rawan terjadinya konflik horisontal antara massa simpatisan partai peserta Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak.
- 5) Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan pengamanan baik di lokasi kampanye maupun pengawalan kepada Kapolres.

g. Satuan Lalu Lintas.

- 1) Setting kekuatan lalu lintas dalam pengamanan route massa dari tempat berkumpul menuju ke lokasi kampanye.
- 2) Melaksanakan pengawalan panitia penyelenggara, juru kampanye dan tamu VIP serta massa partai dari tempat transit atau berkumpul ke lokasi kampanye.
- 3) Bersama-sama dengan petugas DLLAJ memperlancar dan mengalihkan arus lalu lintas.
- 4) Dengan menggunakan pengeras suara memberi penerangan kepada massa peserta kampanye agar tertib dalam perjalanan dan tidak melanggar peraturan lalu lintas.
- 5) Mengendalikan Sat gas partai, pramuka yang ikut serta dalam pengamanan kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak.
- 6) Menyiagakan mobil derek yang dapat digunakan sewaktu-waktu ada kendaraan yang mogok dan atau kecelakaan untuk menghindari kemacetan lalu lintas.

- 7) Menyiagakan kendaraan truk, bus atau kendaraan lainnya yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk mengangkut pasukan cadangan atau mengangkut massa kampanye kembali dari lokasi kampanye, untuk menghindari tertumpuknya massa di lokasi kampanye.
  - 8) Melaporkan setiap perkembangan kelancaran arus lalu lintas kepada Kapolres.
- h. Satuan Reserse Kriminil.
- 1) Membagi kekuatan Reserse Kriminal menjadi unit-unit operasional Reserse yaitu :
    - a) Unit penyelidikan.
    - b) Unit penindakan.
    - c) Unit penyidikan ( pemeriksaan )
    - d) Unit TPTKP.
  - 2) Melaksanakan pengamanan tertutup terhadap panitia penyelenggara, juru kampanye, tamu VIP dan massa partai peserta kampanye dari teror, intimidasi dan kejahatan lainnya.
  - 3) Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak yang dilaporkan oleh KPU maupun tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak.
  - 4) Melaksanakan penyelidikan terhadap residivis pelaku tindak pidana yang diprediksi akan melakukan tindak pidana selama pelaksanaan Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak berlangsung.
  - 5) Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dan Pengadilan Negeri berkaitan dengan percepatan dan ketepatan penyidikan tindak pidana Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak dan atau tindak pidana yang berkaitan dengan Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak.
  - 6) Melaporkan pelaksanaan pengamanan kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak dan penyidikan yang dilaksanakan kepada Kapolres.
- i. Satuan Narkoba.
- 1) Membagi kekuatan anggota Sat Narkoba menjadi unit-unit operasional yaitu :
    - a) Unit penyelidikan.
    - b) Unit penyidikan.
    - c) Unit penyitaan barang bukti.

- 2) Melaksanakan penyelidikan terhadap kemungkinan penyalahgunaan Narkoba oleh massa peserta kampanye pada saat mengikuti kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak.
  - 3) Melaksanakan penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba baik sebagai pemakai maupun sebagai pengedar pada saat kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak.
  - 4) Koordinasi dengan Dokter kesehatan dan laboratorium forensik Polri dalam rangka pembuktian secara medis dan ilmiah terhadap pelaku yang ditangkap.
  - 5) Melaporkan perkembangan pelaksanaan pengamanan dan penyidikan tindak pidana Narkoba selama kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak kepada Kapolres.
- j. Satuan Pengamanan Obyek Vital.
- 1) Melaksanakan pengecekan terhadap obyek vital yang perlu dilaksanakan pengamanan dan menyiagakan Satpam obyek vital yang tidak ada Satpamnya.
  - 2) Menghimbau kepada pimpinan obyek vital untuk menyediakan tenaga Satpam dan atau tenaga keamanan swakarsa lainnya untuk menjaga obyek vitalnya.
  - 3) Melaporkan setiap perkembangan situasi pengamanan obyek vital selama kampanye berlangsung kepada Kapolres.
- k. Satuan Pengamanan Pariwisata.
- 1) Melaksanakan kegiatan pemantauan tentang kemungkinan adanya wisatawan asing yang berada di sekitar lokasi kampanye.
  - 2) Bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten / Kota mengenai pengamanan wisatawan asing yang berada di sekitar lokasi kampanye.
  - 3) Melaporkan setiap perkembangan wisatawan asing pada saat kampanye berlangsung.
- l. Unit Kedokteran Kesehatan.
- 1) Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kesehatan berkaitan dengan penyediaan tenaga dokter dan perawat baik di rumah sakit maupun di Puskesmas serta kesiapsiagaan mobil ambulan di sekitar lokasi kampanye.
  - 2) Melaksanakan pendistribusian obat-obatan suplemen kepada anggota di lapangan.
  - 3) Melaporkan setiap perkembangan kepada Kapolres.
- m. Urusan Telematika.

- 1) Melaksanakan pencatatan setiap perkembangan situasi pengamanan kampanye melalui alat komunikasi.
  - 2) Melaksanakan koordinasi dan pengendalian terhadap anggota Orari dan Rapi yang ikut serta dalam pengamanan agar selalu melaporkan perkembangan situasi kampanye di sekitarnya.
  - 3) Mendatakan pelanggaran, kegiatan kampanye yang terjadi dan melaporkan kepada Kapolres, setiap hari " H " pelaksanaan kampanye.
- n. Sentra Pelayanan Masyarakat.
- 1) Melaksanakan penerimaan laporan masyarakat tentang telah terjadinya kejahatan selama kampanye berlangsung.
  - 2) Mendatangi dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara yang dilaporkan selama kampanye berlangsung.
  - 3) Melaporkan setiap penerimaan laporan dari masyarakat tentang telah terjadinya kejahatan selama kampanye berlangsung dan setiap perkembangan penanganan TPTKP kepada Kapolres.

#### **6. Kegiatan Penegakan Hukum Pelanggaran Pilpres ( Represif ).**

Penegakan hukum merupakan salah satu dari sistem pengamanan kampanye, karena dengan penegakan hukum diharapkan dapat menanggulangi berbagai gangguan kriminalitas maupun pelanggaran hukum selama pelaksanaan kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak agar menimbulkan efek jera bagi pelaku dan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama yaitu melanggar hukum.

Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kampanye Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak diberlakukan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pilpres tahun 2014 di Kota Pontianak, penyidikan oleh penyidik paling lambat 30 hari harus sudah selesai, dihitung sejak diterimanya laporan, dan 7 ( tujuh ) hari sejak selesainya penyidikan, penyidik Polri harus sudah menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

#### **Kesimpulan**

1. Dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Presiden Tahun 2014 Polresta Pontianak melakukan pengorganisasian secara intern yaitu pengorganisasian bagian-bagian dan satuan-satuan operasional Polresta Pontianak menjadi suatu kekuatan yang



utuh dan terkoordinir dengan baik perlu juga dilakukan pengorganisasian secara ekstern yaitu dengan Pemerintahan Kota Kota Pontianak, KPU Kota Pontianak, Panwaslu Kota Pontianak, Panitia Penyelenggara Pilpres 2014 dan Potensi Masyarakat secara terpadu dan terkoordinir secara sistimatis sesuai tugas, peran dan fungsi serta tanggung jawabnya masing-masing dalam rangka penyelenggaraan pemilihan presiden tahun 2014.

2. Faktor dominan yang mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Presiden Tahun 2014 Polresta Pontianak dan ketertiban masyarakat yang prima di wilayah Polresta Pontianak adalah:
  - a. Kondisi geografis Kota Pontianak yang sangat luas 107,82 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk 550.304 jiwa. Sedangkan jumlah personil Polresta Pontianak hanya sebanyak 1331 personil, tentunya tidak memadai dengan upaya Polresta Pontianak dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat kota Pontianak dalam menghadapi penyelenggaraan pilpres tahun 2014.
  - b. Kondisi lapangan kerja di Kota Pontianak yang masih terbatas atau belum sebanding dengan kebutuhan penduduk untuk mendapatkan pekerjaan yang layak diberbagai sektor kehidupan, berpotensi untuk menciptakan gangguan dalam penyelenggaraan Pilpres 2014 di Kota Pontianak.
  - c. Kondisi sosial ekonomi, sosial politik dan sosial budaya di Kota Pontianak yang masih rawan terhadap dinamika kehidupan demokrasi yang menyimpang dari nilai-nilai moral, agama, sosial, dan ketentuan hukum yang berlaku, dapat memicu terjadinya konflik horizontal dan/atau kejahatan berdampak kontijensi.
3. Strategi-Strategi yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Pontianak dalam menjaga menjaga ketertiban pada penyelenggaraan pemilihan umum presiden 2014 melalui pencegahan, penangkalan dan penanggulangan kejahatan untuk menopang terlaksananya pemilihan umum presiden tahun 2014 yang kondusif dengan cara :
  - a. Meningkatkan pelaksanaan fungsi kepolisian secara optimal, menjalin kemitraan Polri dengan Pemerintah Kota Pontianak, KPU Kota Pontianak, Panwaslu Kota Pontianak dan Instansi terkait, memantapkan kemitraan Polri dengan Masyarakat, serta meningkatkan kemampuan, watak, jati diri dan profesionalitas personil Polri secara berkelanjutan.
  - b. Melakukan penangkalan, terhadap kondisi “ambang gangguan” kamtibmas dengan sasaran untuk mengurangi “faktor kesempatan” dan menurunkan “faktor niat” melalui pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patroli.

- c. Melakukan penegakan hukum terhadap "ancaman nyata" kamtibmas secara tegas, konsekuen dan konsisten berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU-BUKU :**

- Armia, Muhammad Shiddiq, Tgk. 2003. ***Perkembangan Pemikiran dalam Ilmu Hukum***, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Asshiddiqie, Jimly 2002. ***Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat***, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. ***Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara***, Kompas, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. ***Hukum Acara Pengujian Undang-Undang***, Pusat Study Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Azhary, M. Tahir. 1992. ***Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini***. Jakarta : Bulan Bintang.
- Budiarjo, Miriam. 1982. ***Dasar-Dasar Ilmu Politik***. Jakarta : Gramedia.
- Estiko, Didit Hariadi, dan Suhartono (Ed). 2003. ***Mahkamah Konstitusi: Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi : Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi***, Jakarta : Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR-RI, Agarino Abadi.
- Halim, A. Ridwan. 1985. ***Pengantar Tata Hukum Indonesia dalam Tanya Jawab***. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- , 1987. ***Pokok-Pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab***. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Hamzah, Andi. 1996. ***Hukum Acara Pidana Indonesia***. Jakarta : Saptar Artha Jaya.
- Huda, Ni'matul. 2003. ***Politik Ketatanegaraan Indonesia : Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945***. Yogyakarta : FH UII Press.
- Kompas (Jakarta). 16 Juni 2003, 23 Juni 2003, 4 Juli 2003, dan 11-16 Agustus 2003.
- Kusnardi, M. dan Bintan R. Saragih. 1994. ***Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945***. Jakarta : Gramedia. Lampung Post (Lampung). 10-11 Agustus 2003.
- Logeman, J.H.A. 1975. ***Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif (Judul Asli : Over de Theorie van een Stellig Staats Recht, 1948)***. Diterjemahkan oleh Makkatutu dan J.C. Pengkorego. Jakarta : Ichtiar Baru-Van Hoeve.
- Manan, Bagir. 2003. ***Teori dan Politik Konstitusi***. Yogyakarta : FH UII Press.

- Mertokusumo, Sudikno, dan A. Pitio. 1993. ***Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Kerj Sama antara Konsorsium Ilmu Hukum***, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan The Asia Foundation. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Nusantara Abdul Hakim G. 1998. ***Politik Hukum Indonesia***. Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Panggabean, Henry P. 2001. ***Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari : Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung***, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Saleh, K. Wantjik. 1976. ***Kehakiman dan Peradilan***. Jakarta : Sumber Cahaya.
- Sjah, Djalinus, dan Azimar Enong. 1983. Serie 555 : ***Kamus Umum Lengkap Internasional Populer***. Jakarta : Simplex Publishing Company.
- Sunny, Ismail. 1985. ***Pembagian Kekuasaan : Suatu Penyelidikan Perbandingan dalam Hukum Tata Negara Inggris, Amerika Serikat, Uni Soviet dan Indonesia***. Jakarta : Aksara Baru.
- Sri Soemantri. 1997. ***Hak Uji Material di Indonesia***, Alumni, Bandun.
- Wahyono, Padmo. 1987. ***Kamus Tata Hukum Indonesia***. Jakarta. Ind. Hill-Co.
- Widjojanto, Bambang, Saldi Isra, dan Marwan Mas (Ed.). 2002. ***Konstitusi Baru Melalui Komisi Konstitusi Independen***. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

